



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib tidak pelayanan dasar dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang tenaga kerja, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selama satu periode Tahun Anggaran 2019.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan Tahun Anggaran 2019.

## **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69 );
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70 );
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 36).



### **C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I**   Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II**   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III**   Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
  - 1. Belanja
- B. Neraca
  - 1. Aset
  - 2. Kewajiban
  - 3. Ekuitas
- C. Laporan Operasional
  - 1. Pendapatan LO
  - 2. Beban
  - 3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
- D. Laporan Perubahan Ekuitas
  - 1. Ekuitas Awal
  - 2. Surplus / Defisit LO
  - 3. Ekuitas Akhir

#### **Bab IV**   Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

#### **Bab V**   Penutup.



**BAB II**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**A. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi belanja.

NO. REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	%
1	URUSAN WAJIB	4,783,933,263.00	4,739,801,760.00	44,131,503.00	99.08
2	URUSAN PILIHAN	-	-	-	-
JUMLAH		4,783,933,263.00	4,739,801,760.00	44,131,503.00	99.08

**B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Belanja

Belanja tidak terserap ( yang lebih dari 1%) disebabkan karena :

- a. Jumlah pegawai belum terpenuhi
- b. Belanja Makanan dan Minuman serta belanja material tidak biasa maksimal karena menyesuaikan kebutuhan pelatihan
- c. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Belanja .  
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**a. Belanja**

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.  
Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	4,215,091,263.00	4,174,821,760.00	40,269,503.00	99.04
2	BELANJA MODAL	568,842,000.00	564,980,000.00	3,862,000.00	99.32
	JUMLAH	4,783,933,263.00	4,739,801,760.00	44,131,503.00	99.08

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 4.739.801.760,00 atau 98,08 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.100.634.688,00 maka ada kenaikan sebesar 430,6%. Hal ini dikarenakan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi instansi baru setelah dipecah dari Dinas PTSP dan Naker menjadi Dinas Ketenagakerjaan yang baru bisa melakukan belanja sesuai DPA Perubahan tertandatangani yaitu pada bulan Nopember 2018. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2019 dengan realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

		2019		2018	
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4,215,091,263.00	4,174,821,760.00	935,941,588.00	446.1
2	Belanja Modal	568,842,000.00	564,980,000.00	164,693,100.00	343.1
	JUMLAH	4,783,933,263.00	4,739,801,760.00	1,100,634,688.00	430.6

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

**1) BELANJA OPERASI**

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja



bantuan keuangan. Belanja operasi SKPD Ketenagakerjaan meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

2019		2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2,127,212,263.00	2,103,624,138.00	310,822,600.00
2,087,879,000.00	2,071,197,622.00	625,118,988.00
4,215,091,263.00	4,174,821,760.00	935,941,588.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2019 lebih rendah Rp. 40.269.503,00 atau 0,96 %.

**a) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

<b>Belanja Tidak Langsung:</b>				
Gaji dan Tunjangan	1,238,848,278.00	1,225,984,854.00	98.96	(12,863,424.00)
Tambahan Penghasilan PNS	659,438,985.00	649,434,284.00	98.48	(10,004,701.00)
	1,898,287,263.00	1,875,419,138.00	98.80	(22,868,125.00)
<b>Belanja Langsung:</b>				
Honorarium PNS	61,925,000.00	61,925,000.00	100.00	-
Honorarium Non PNS	167,000,000.00	166,280,000.00	99.57	(720,000.00)
Uang Lembur	-	-	-	-
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-
	228,925,000.00	228,205,000.00	99.69	(720,000.00)
	2,127,212,263.00	2,103,624,138.00	98.89	(23,588,125.00)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 2.103.624.138,00 (98,89 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23.588.125,00 (1,11 %).

**b) Belanja Barang**

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:





Belanja Barang:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Bahan Pakai Habis	171,058,000.00	171,008,000.00	99.97	(50,000.00)
Belanja Bahan/Material	146,227,500.00	145,238,425.00	99.32	(989,075.00)
Belanja Jasa Kantor	528,300,000.00	523,516,331.00	99.09	(4,783,669.00)
Belanja Premi Asuransi	48,125,000.00	48,125,000.00	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112,741,500.00	112,627,300.00	99.90	(114,200.00)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	61,610,000.00	61,610,000.00	100.00	-
Belanja Sewa				
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/mobil	33,200,000.00	33,200,000.00	100.00	-
Belanja Makan Minum	197,160,000.00	189,801,000.00	96.27	(7,359,000.00)
Belanja Pakaian Kerja & Khusus	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	-
Belanja Perjalanan Dinas	310,357,000.00	309,471,566.00	99.71	(885,434.00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	-
Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	15,200,000.00	15,200,000.00	100.00	-
Belanja Jasa konsultasi	-	-	-	-
Belanja Survey dan Penyusunan Design Engineering	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	-
Belanja Barang dan Jasa Dana JKN	-	-	-	-
Uang untuk diberikan kpd masy/pihak ketiga	-	-	-	-
Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara	240,900,000.00	238,400,000.00	98.96	(2,500,000.00)
Jumlah	2,087,879,000.00	2,071,197,622.00	99.20	(16,681,378.00)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 2.071.197.622,00 atau 99,20 % dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 16.681.378,00 atau 0,80 %.

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Belanja Modal:	Tahun 2019		Tahun 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	503,442,000.00	499,830,000.00	164,693,100.00
Belanja Gedung dan Bangunan	65,400,000.00	65,150,000.00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya			
	568,842,000.00	564,980,000.00	164,693,100.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2019 lebih rendah Rp.3.862.000,00 atau 0,68 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan



realisasi tahun 2019, realisasi belanja modal Tahun 2019 lebih besar Rp.400.286.900,00 atau 242 %.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap .

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	-	-	-
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin :</b>			
Belanja Modal pengadaan alat-alat berat	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan	263,000,000	260,000,000	98.86
Belanja Modal Pengadaan alat-alat bengkel	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat pertanian dan peternakan	118,742,000	118,580,000	99.86
Belanja Modal pengadaan alat-alat kantot rumah	121,700,000	121,250,000	99.63
Belanja Modal pengadaan alat-alat studio	-	-	-
	503,442,000	499,830,000	99.28
<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>			
	65,400,000	65,150,000	99.62
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:</b>			
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	-	-	-
	-	-	-
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:</b>			
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	-
	-	-	-
	568,842,000	564,980,000	99.32
<b>Jumlah Belanja Modal</b>			

B. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Dinas Ketenagakerjaan terbagi dalam :



<i>Uraian</i>	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Aset Lancar	-	-
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	6,146,721,030.00	4,291,084,030.00
4. Aset Lainnya	-	-

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas Ketenagakerjaan yang pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.291.084,00 menjadi Rp. 6.146.721.030 sehingga ada kenaikan jumlah aset sebesar Rp. 1.855.637.000,00 atau 30.19 %.

**a. ASET TETAP**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp. 6.146.721.030,00 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	1,752,430,314.00	765,410,000.00	163,580,000.00	2,354,260,314.00
Gedung dan Bangunan	1,859,920,000.00	1,253,807,000.00	-	3,113,727,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	674,226,595.00	-	-	674,226,595.00
Aset tetap lainnya	4,507,121.00	-	-	4,507,121.00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
	<b>4,291,084,030.00</b>	<b>2,019,217,000.00</b>	<b>163,580,000.00</b>	<b>6,146,721,030.00</b>

Nilai aset tetap per 31 Desember 2019 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:\



**1) Penambahan aset tetap**

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<b>Realisasi Belanja Modal 2019 (Rp)</b>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	499,830,000.00
3 Gedung dan Bangunan	65,150,000.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<b>564,980,000.00</b>

b) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<b>Mutasi Antar SKPD</b>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	147,000,000.00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<b>147,000,000.00</b>

c) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<b>Aset dari Pindahan antar Rekening</b>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	118,580,000.00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<b>118,580,000.00</b>

d) Penambahan Aset dari Hibah pada kelompok aset tetap sebagai berikut:



<i>Uraian</i>	<i>Aset dari Hibah</i>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	1,188,657,000.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>1,188,657,000.00</u>

## 2) Pengurangan Aset tetap

- a) Pengurangan aset tetap karena pindah antar rekening lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Pindah Antar Rekening</i>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	118,580,000.00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>118,580,000.00</u>

- b) Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2019 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Extracountable</i>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	45,000,000.00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>45,000,000.00</u>

### 1) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.260.314,00 naik sebesar Rp. 601.830.000,00 atau 34,34 % dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2018 yang sebesar 1.752.430.314,00.

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:



<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2019</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2018</i>	<i>Naik (turun)</i>
Alat-alat besar	-	-	-
Alat -alat angkutan	799,520,100.00	392,520,100.00	407,000,000.00
alat-alat bengkel dan alat ukur	263,166,178.00	263,166,178.00	-
alat-alat pertanian dan	-	-	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	1,231,013,136.00	1,036,183,136.00	194,830,000.00
alat-alat studio dan komunikasi	26,880,900.00	26,880,900.00	-
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	33,680,000.00	33,680,000.00	-
alat-alat keamanan	-	-	-
	<b>2,354,260,314.00</b>	<b>1,752,430,314.00</b>	<b>601,830,000.00</b>

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2019 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Mutasi penambahan
- Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp. 765.410.000,00 terdiri dari :
- (1) Belanja Modal sebesar Rp. 499.830.000,00
  - (2) Selain Belanja Modal sebesar Rp. 265.580.000,00 berasal dari :

Uraian	Mutasi Tambah (Rp)
APBN	0,00
APBD (Mutasi SKPD)	147.000.000,00
Hibah	0,00
Koreks	0,00
Reklasifikasi	118.580.000,00
Aset dari belanja barang dan jasa	0,00
	265.580.000,00

- b) Mutasi Pengurangan
- Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2019 sebesar Rp. 163.580.000,00 dengan perincian sebagai berikut :



**Mutasi Kurang (Rp)**

1 Mutasi SKPD	-
2 Koreksi	-
3 Rusak Berat	-
4 Extracountable	45,000,000.00
5 Reklasifikasi	118,580,000.00
	<u>163,580,000.00</u>

**2) Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.113.727.000,00 naik sebesar Rp. 1.253.807.000,00 atau 67,41 % dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.859.920.000,00.

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2019 berasal dari mutasi penambahan.

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp. 65.150.000,00 terdiri dari :

(1) Selain Belanja Modal sebesar Rp. 1.188.657.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Mutasi Tambah (Rp)**

a APBN	-
b Mutasi SKPD	-
c Hibah	1,188,657,000.00
d Aset tidak dari Belanja Modal	-
e Pindahan antar rekening	-
	<u>1,188,657,000.00</u>

**3) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 674.226.595,00 tidak ada kenaikan dari neraca tahun 2018.

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2019:

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	neraca per 31 Des 2019	neraca per 31 Des 2018	Naik (turun)
Jalan dan Jembatan	276,800,874.00	276,800,874.00	-
Bangunan air	69,366,918.00	69,366,918.00	-
Instalasi	119,941,003.00	119,941,003.00	-
Jaringan	208,117,800.00	208,117,800.00	-
	<u>674,226,595.00</u>	<u>674,226,595.00</u>	-

**4) Aset Tetap Lainnya**



Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.507.121,00. Tidak ada penambahan aset tetap lainnya dalam tahun 2019.

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	neraca per 31 Des 2019	neraca per 31 Des 2018	Naik (turun)
Buku dan Kepustakaan	4,507,121.00	4,507,121.00	-
Barang Bercorak Seni			
Kebudayaan	-	-	-
Hewan, ternak dan			
Tumbuhan	-	-	-
	<b>4,507,121.00</b>	<b>4,507,121.00</b>	<b>-</b>

### 3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2019 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2018 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi	2,363,147,198.00	1,739,755,950.00	623,391,248.00
Penyusutan Aset			
Tetap	<b>2,363,147,198.00</b>	<b>1,739,755,950.00</b>	<b>623,391,248.00</b>

## 1. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2019, kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari:

<b>Uraian</b>	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	53,828,311.00	38,135,875.00	15,692,436.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	<b>53,828,311.00</b>	<b>38,135,875.00</b>	<b>15,692,436.00</b>

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 terdiri dari:





<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	53,828,311.00	38,135,875.00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>53,828,311.00</b>	<b>38,135,875.00</b>

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

**1) Hutang Belanja.**

Meliputi TPP bulan Desember 2019 sebesar Rp. 53.550.124,00 dan tagihan Telepon bulan Desember 2019 sebesar Rp. 278.187,00

**2. EKUITAS**

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Ekuitas	3,730,289,521.00	2,513,192,205.00
	<b>3,730,289,521.00</b>	<b>2,513,192,205.00</b>

**C. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**1. BEBAN**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2019, beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 4.708.243.494,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.166.779.256,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.541.464.238,00 atau 403,52 %. Berikut realisasi beban 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 :



Beban	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1,891,269,262.00	262,197,600.00	1,629,071,662.00	721.31
Beban Persediaan	475,702,425.00	165,841,500.00	309,860,925.00	286.84
Beban Jasa	1,430,699,643.00	411,722,875.00	1,018,976,768.00	347.49
Beban Pemeliharaan	127,827,300.00	17,305,704.00	110,521,596.00	738.64
Beban Perjalanan Dinas	309,471,566.00	122,333,784.00	187,137,782.00	252.97
Beban Penyusutan	473,273,298.00	187,377,793.00	285,895,505.00	252.58
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
BLUD	-	-	-	-
	4,708,243,494.00	1,166,779,256.00	3,541,464,238.00	403.52

a. **Beban Pegawai**

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.891.269.262,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 262.197.600,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.629.071.662,00 atau naik sebesar 721.31 %.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

Beban Pegawai	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	1,225,984,854.00
Tambahan Penghasilan PNS	649,434,284.00
Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2018	(37,700,000.00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Uang Lembur	
Belanja Pegawai BLUD	
	1,837,719,138.00
TPP Bulan Desember 2019	53,550,124.00
	1,891,269,262.00

b. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 475.702.425,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 165.841.500,00 maka ada kenaikan beban persediaan sebesar Rp. 309.860.925,00 atau 286,84%. Beban Persediaan terdiri dari :



<b>Beban Persediaan</b>	Nominal (Rp)
Bahan Pakai Habis	171,008,000.00
Bahan Material	145,238,425.00
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke	160,000,000.00
	476,246,425.00
Bahan Pakai Habis ( Stock Opname )	(544,000.00)
	475,702,425.00

**c. Beban Jasa**

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah. Beban jasa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.430.699.643,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 406.398.875,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 1.018.976.768,00 atau 347,49%.

Beban Jasa terdiri dari :

<b>Beban Jasa</b>	Nominal (Rp)
Honorarium PNS	61,925,000.00
Honorarium Non PNS	166,280,000.00
Jasa Kantor	523,516,331.00
Premi Asuransi	48,125,000.00
Cetak dan Penggandaan	61,610,000.00
Sewa	33,200,000.00
Makan Minum	189,801,000.00
Pakaian dinas	28,000,000.00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	35,000,000.00
Jasa Konsultasi	-
Survey dan Penyusunan Design	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
rb	45,000,000.00
Belanja Jasa Narasumber	238,400,000.00
Belanja Telp, listrik air 2019	278,187.00
Belanja Telp, listrik air 2018	(435,875.00)
	1,430,699,643.00



**d. Beban Pemeliharaan.**

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 127.827.300,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.305.704,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 110.521.596,00 atau 738,64%.

B	
e	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>
e	Nominal (Rp)
b	Belanja kursus, pelatihan dan
b	sosialisasi
a	Pakaian Dinas
n	Perjalanan Dinas
	309,471,566.00
	309,471,566.00

p  
emeliharaan tahun 2019 terdiri dari :

<b>Beban Pemeliharaan</b>	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	112,627,300.00
Pemeliharaan gedung, dll	15,200,000.00
	127,827,300.00

**e. Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 309.471.566,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 122.333.784,00 maka ada kenaikan beban perjalanan dinas sebesar Rp. 187.137.782,00 atau 252,97%.

**f. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 473.273.298,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.377.793,00 sehingga ada kenaikan beban penyusutan sebesar Rp. 285.895.505,00 atau 252,58%.

**2. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL**

Dalam kegiatan operasional Tahun 2019, realisasi beban operasional sebesar Rp. 4.708.243.494,00 sedangkan realisasi beban operasional Tahun 2018 sebesar Rp.



1.166.779.256,00 namun demikian pada Tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.185.539.050,00 maka mengalami kenaikan surplus/defisit sebesar Rp. 2.355.925.188,00. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	1,185,539,050.00	-	1,185,539,050.00	100.00
Beban	4,708,243,494.00	1,166,779,256.00	3,541,464,238.00	303.52
<b>Jumlah</b>	<b>(3,522,704,444.00)</b>	<b>(1,166,779,256.00)</b>	<b>(2,355,925,188.00)</b>	<b>201.92</b>

#### D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

##### 1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.513.192.205,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2018.

##### 2. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.522.704.444,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

##### 3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2019 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2019.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp. 4.739.801.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Rp)
1 Surplus/Defisit LRA	4,739,801,760.00
1 Penambahan aset tetap	265,580,000.00
2 Pengurangan aset tetap	(118,580,000.00)
3 Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang dihapuskan	-
4 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke SKPD lain	-
5 Perhitungan akumulasi penyusutan AT dari SKPD SKPD lain	(147,000,000.00)
6 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	
7 Perhitungan hutang Retensi	
8 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	
9 Perhitungan hutang jangka pendek lainnya	
10 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
	<b>4,739,801,760.00</b>

Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2019 sebagai berikut :

##### a. Penambahan aset tetap



Penambahan aset tetap sebesar Rp. 265.580.000,00, terdiri dari :

- a) Penambahan AT dari Mutasi SKPD lain Rp. 147.000.000,00
- b) Penambahan AT dari Pindahan Antar Rekening Rp. 118.580.000,00

**b. Pengurangan Aset Tetap**

Pengurangan aset tetap sebesar Rp.118.580.000,00 terdiri dari :

<b>Pengurangan Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2019(Rp)</b>
Pengurangan karena penghapusan	-
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain	-
Pengurangan karena Hibah	-
Pengurangan karena SK Koreksi	-
Pengurangan karena rusak berat	-
Pengurangan karena extracountable	-
Pengurangan karena pindahan antar rekening	118,580,000.00
Pengurangan karena Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>118,580,000.00</u></b>

**c. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari SKPD Lain**

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dari SKPD lain sebesar Rp.147.000.000,00 merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari SKPD lain.

**4. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.730.289.521,00.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2019 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2 Januari 2019  
**Kepala Dinas Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Batang**

**Drs. TULYONO, M.Si**  
**NIP. 19600603 198003 1 002**